

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM merupakan kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sektor UMKM di Indonesia pada tahun 2023 mengalami kemajuan yang signifikan di setiap kuartalnya, dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,55%. UMKM di Indonesia menjadi tulang punggung di sektor riil yang meliputi perdagangan, jasa, dan industri manufaktur skala kecil. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi untuk menghasilkan produk sumber daya penting yang mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.

Salah satu bentuk kontribusi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional adalah perannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang membantu meningkatkan pendapatan negara. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, sektor UMKM saat ini menjadi andalan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang melemah (Damayanti, SE., M.Si. & Amanah, 2021). UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia,

dengan nilai sekitar Rp 9.850 triliun, serta menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, di tahun 2023 Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Kelompok industri pakaian jadi menjadi sektor dengan kontribusi nilai tambah terbesar kedua yang pertumbuhannya konsisten dari waktu ke waktu, dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,02% (Indonesia, 2024).

Meskipun telah menunjukkan peningkatan dan secara keseluruhan mengalami pemulihan, sektor UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan hingga menghambat kemajuan dan kemampuan mereka untuk bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional. Berdasarkan data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada tahun 2020, terdapat sekitar 46,6 juta dari total enam puluh empat juta UMKM di Indonesia belum memperoleh akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan non bank (Suhartini, 2024). Minimnya sumber pembiayaan menyebabkan banyak UMKM kesulitan dalam memulai usaha, memperluas bisnis, dan bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain itu, tingginya suku bunga pinjaman dan ketidakpastian mengenai syarat kredit menjadi tantangan ekstra bagi pelaku UMKM yang mengakibatkan UMKM seringkali terjebak dalam siklus hutang yang sulit dihindari (KJA Atik

Sri Purwantiningsih, 2024). Meskipun program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah tersedia, akan tetapi akses terhadap program ini tidak selalu mudah dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku UMKM.

Modal merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan usaha dan keterbatasan modal dapat membatasi perkembangan usaha tersebut. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat menjadi salah satu solusi bagi UMKM yang membutuhkan tambahan modal. CSR merupakan wujud kepekaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat perusahaan tersebut beroperasi (Raffly Aulia Bachtiar & Noriska, 2023). Melalui program CSR, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional, termasuk dalam pemberdayaan UMKM. CSR sendiri tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, akan tetapi juga sebagai bentuk kesempatan untuk memperkuat citra dan hubungan positif dengan masyarakat setempat.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 terkait Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, bab 1

pasal 1 menyatakan bahwa Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Pendanaan UMK adalah program yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan kecil agar menjadi mandiri dan tangguh. Selain itu, dalam pasal 1 juga menjelaskan bahwa Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang selanjutnya disebut Program TJSL BUMN, merupakan komitmen BUMN terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Program TJSL BUMN memiliki prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, dapat dipertanggungjawabkan, dan menjadi bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara terkait Penugasan Khusus dan Program TJSL BUMN pada bab 3 pasal 20, dijelaskan bahwa pelaksanaan program TJSL BUMN dapat diwujudkan dalam bentuk seperti pembiayaan usaha mikro dan kecil, pemberian bantuan dan/atau kegiatan lainnya termasuk pembinaan. Guna mendukung pelaksanaan program pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK dan pada pasal 21 disebutkan bahwa program ini ditujukan kepada usaha mikro dan kecil yang menjadi binaan BUMN.

Industri batik merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian di Indonesia yang berperan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan nasional, akan tetapi juga untuk melestarikan warisan budaya bangsa. Dalam tingkat lokal, sektor industri batik didominasi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Batik tidak hanya menjadi simbol budaya Indonesia, namun juga memiliki nilai ekonomi yang cukup besar baik di pasar domestik maupun internasional. Industri batik tersebar di berbagai wilayah di Pulau Jawa dengan setiap daerah menghadirkan corak dan karakteristik yang unik. Keberagaman ini memperkaya identitas budaya nasional sekaligus membuka peluang besar untuk pengembangan ekonomi kreatif.

Seiring dengan pesatnya perkembangan UMKM di sektor industri batik, muncul tantangan baru terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Pada umumnya, proses produksi batik menghasilkan limbah cair yang sering dibuang ke perairan di lingkungan sekitarnya. Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik memiliki potensi dapat menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti pencemaran air, merusak kehidupan akuatik seperti ikan dan mikroorganisme, penurunan

kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, hingga merusak tanah (Abdul Hannan et al., 2024). Dalam hal ini, limbah sering dibuang langsung ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan yang layak. Kondisi ini lebih sering terjadi di daerah dengan infrastruktur pengelolaan limbah yang terbatas, seperti di pedesaan atau di kawasan industri kecil. Selain itu, para pelaku UMKM juga membuang limbah mereka ke saluran air atau ke Tempat Pembuangan Air (TPA) tanpa pengelolaan yang khusus.

Beberapa UMKM, terutama yang berada di perkotaan, sudah mulai menerapkan sistem pembuangan sederhana, seperti memisahkan limbah organik dan anorganik. Akan tetapi, sering kali pengelolaan limbah lebih lanjut, seperti daur ulang atau pengomposan belum dilakukan dengan benar. Mereka lebih banyak bergantung pada sistem pembuangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga. Di sisi lain, pada sejumlah sektor UMKM di Indonesia mulai berinovasi dengan mendaur ulang limbah mereka sendiri, misalnya UMKM di sektor makanan dan minuman menggunakan limbah hasil produksi mereka untuk menghasilkan kerajinan tangan yang laku dijual dan pupuk kompos yang lebih ramah lingkungan. Namun, masih banyak UMKM di Indonesia yang masih kurang menyadari pentingnya pengelolaan limbah yang ramah lingkungan karena mereka terfokus pada proses

produksi dan pencapaian keuntungan sehingga aspek pengelolaan limbah sering diabaikan.

Saat ini sudah banyak bermunculan tren untuk menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, namun masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami atau dapat mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan dengan baik. Kendala ini sering berkaitan dengan biaya tambahan yang diperlukan untuk mengubah proses produksi menjadi ramah lingkungan. Akibatnya, penerapan bisnis berkelanjutan dalam proses produksi sering menghadapi kendala meskipun potensi manfaatnya untuk jangka panjang sangat signifikan, seperti peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha. Menanggapi hal tersebut, saat ini berbagai program pendanaan dan dukungan telah dihadirkan untuk membantu UMK agar dapat mengadopsi proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Program-program ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, akan tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional dan profitabilitas usaha.

1.2 Rumusan Masalah

1. Sejauh mana program PUMK PT Petrokimia Gresik berkontribusi terhadap efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan limbah di CV Bangsawan Indonesia Textil?

2. Bagaimana efektivitas program PUMK oleh PT Petrokimia Gresik dalam meningkatkan laporan laba usaha CV Bangsawan Indonesia Textil melalui pengelolaan limbah pada tahun 2022?
3. Bagaimana program PUMK memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap perkembangan dan operasional CV Bangsawan Indonesia Textil?
4. Bagaimana pencapaian SDGs dalam efektivitas program PUMK terhadap laporan laba usaha CV Bangsawan Indonesia Textil dalam pengelolaan limbah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh program PUMK PT Petrokimia Gresik terhadap laporan laba usaha dalam industri CV Bangsawan Indonesia Textil
2. Untuk menilai tingkat efektivitas program PUMK PT Petrokimia Gresik dalam meningkatkan pengelolaan limbah di industri CV Bangsawan Indonesia Textil
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program PUMK dalam mendukung pengelolaan limbah dan kinerja usaha mitra binaan PT Petrokimia Gresik

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi PT Petrokimia Gresik: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai efektivitas program PUMK yang telah diterapkan, serta rekomendasi untuk perbaikan program tersebut agar dapat lebih maksimal dalam mendukung mitra binaan terutama terkait pengelolaan limbah dan peningkatan laba usaha
2. Bagi Industri CV Bangsawan Indonesia Textil: Hasil penelitian ini nanti dapat memberikan gambaran sejauh mana dukungan pendanaan ini dapat mempengaruhi pengelolaan limbah dan kinerja usaha sehingga dapat membantu meningkatkan efektivitas penggunaan dana dan perbaikan proses produksi
3. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna dalam hal pengembangan kebijakan pendanaan UMK yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, terutama dalam sektor industri kecil dan menengah yang memiliki potensi dalam pengelolaan limbah
4. Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk kajian lebih lanjut mengenai pendanaan UMK dan dampaknya terhadap kinerja usaha serta keberlanjutan usaha serta keberlanjutan lingkungan di industri kecil